

RINGKASAN

HILMI MA'SUM, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Pertanggungjawaban Hukum Notaris Terhadap Penggelapan Dokumen, komisi pembimbing, Ketua : Dr. H. Abdul Aziz Ns, SH., MM., MH dan anggota Dr. Dwi Hapsari Retnaningrum, SH., MH.

Notaris adalah pejabat umum yang bertugas untuk membuat akta otentik dan memberikan jaminan keabsahan hukum terhadap dokumen-dokumen yang dibuatnya. Namun, dalam menjalankan tugasnya, notaris juga memiliki tanggungjawab dalam melakukan tugas profesionalnya dengan mempunyai integritas moral, dalam arti segala pertimbangan moral melandasi pelaksanaan tugas tugas profesionalnya. Sesuatu yang bertentangan dengan yang baik harus dihindarkan walaupun dengan melakukannya, akan memperoleh imbalan jasa yang tinggi. Perimbangan moral dalam melaksanakan tugas profesi tersebut, harus diselaraskan dengan nilai-nilai dalam masyarakat, nilai-nilai sopan santun, dan agama yang berlaku. Tidak penting bahwa seseorang hanya memiliki kemampuan profesional yang tinggi, tetapi notaris baru mempunyai arti apabila disamping mempunyai kemampuan profesional adalah seorang yang bermoral.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis Pertanggungjawaban Hukum Notaris terhadap Penggelapan Dokumen dan Putusan Nomor 2015/Pid/B/2010/PN.JKT.PST. Jenis Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pendekatan secara yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan Konseptual.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1). Pertanggungjawaban Hukum Notaris Terhadap Penggelapan dokumen merupakan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan dimana Notaris wajib bertanggungjawab atas perbuatan sebagai Pejabat dengan dikenakan sanksi Pidana penjara, meskipun dalam UUJN tidak mengatur tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris. (2) Akibat Hukum Putusan Nomor 2015/Pid.B/2010/PN.JKT. PST bagi notaris yang melakukan penggelapan dokumen. Maka hal tersebut Notaris akan diancam dengan sanksi pidana penjara serta pemeberhentian dengan tidak hormat yang diatur dalam UUJN

Selain sanksi pidana, notaris yang melakukan penggelapan dokumen juga akan kehilangan kepercayaan masyarakat dan reputasinya sebagai pejabat publik. Hal ini dapat berdampak negatif pada karir dan praktik notaris tersebut, karena masyarakat cenderung akan menghindari menggunakan jasa notaris yang tidak dapat dipercaya. Untuk mencegah terjadinya penggelapan dokumen, notaris harus menjalankan tugasnya dengan integritas dan kehati-hatian yang tinggi. Mereka harus memastikan bahwa dokumen yang mereka tangani disimpan dengan aman dan diarsip dengan benar.

Secara keseluruhan, notaris memiliki tugas untuk menegakkan integritas sistem hukum dan melindungi kepentingan para pihak yang terlibat dalam dokumen yang ditanganinya. Penggelapan dokumen merusak kepercayaan masyarakat terhadap Notaris.

Kata kunci: *pertanggungjawaban hukum, notaris, penggelapan, sanksi.*

SUMMARY

HILMI MA'SUM, Master Program of Notary Law Faculty of Jenderal Soedirman University, Liability of Notaries for Document Embezzlement, Supervisory commission, Chair: Dr. H. Abdul Aziz Ns, SH., MM., MH and members of Dr. Dwi Hapsari Retnaningrum, SH., MH.

A notary is a public official whose job is to make authentic deeds and guarantee the legal validity of the documents he makes. However, in carrying out their duties, a notary also has the responsibility to carry out his professional duties with moral integrity, in the sense that all moral considerations underlie the performance of his professional duties. Something that is contrary to what is good must be avoided even if by doing so, you will get high rewards for services. The moral balance in carrying out the duties of the profession must be aligned with the values in society, the values of courtesy, and the prevailing religion. It is not important that a person only has high professional ability, but a new notary has meaning if in addition to having professional ability is a moral person.

This research was conducted to find out and analyze Notary Legal Liability for Document Embezzlement and Decision Number 2015/Pid/B/2010/PN.JKT.PST. This type of research is a qualitative research with a normative juridical approach. This research was conducted by examining library materials or secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This research approach uses a case approach, statutory approach and conceptual approach.

The results of this study indicate that: (1). Notary's legal responsibility for embezzlement of documents is a crime of embezzlement with a weight where the notary is obliged to be responsible for the actions of an official and is subject to imprisonment, even though UUJN does not regulate criminal acts committed by notaries. (2) Legal Consequences of Decision Number 2015/Pid.B/2010/PN.JKT. PST for notaries who embezzle documents. Then this Notary will be threatened with imprisonment and dishonorable dismissal regulated in UUJN

In addition to criminal sanctions, a notary who embezzles documents will also lose public trust and his reputation as a public official. This can have a negative impact on the career and practice of the notary, because people tend to avoid using the services of a notary who cannot be trusted. To prevent document embezzlement, notaries must perform their duties with high integrity and prudence. They must ensure that the documents they handle are stored securely and properly filed.

Overall, a notary has a duty to uphold the integrity of the legal system and protect the interests of the parties involved in the documents they handle. Embezzlement of documents undermines public trust in notaries.

Keywords: legal liability, notary, embezzlement, sanctions.